



## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### A. Telaah Pustaka

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, terdapat 3 teori yang mendasari hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang diteliti, yaitu teori keagenan, teori legitimasi, dan teori *stakeholder*.

Teori keagenan mengungkapkan hubungan antara agen (manajemen perusahaan) dan prinsipal (*shareholders*). Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Dengan demikian, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut. Teori keagenan juga mendukung pernyataan bahwa perusahaan dengan rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Menurut Darwis (2009) tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak – hak mereka sebagai kreditur.

Teori legitimasi menitik beratkan pada *stakeholder perspective* (masyarakat dalam arti luas), yaitu bagaimana masyarakat menerima / mengakui keberadaan perusahaan di sekitar lingkungan tersebut. Donovan dan Gibson (2000) dalam Darwis (2009) mengemukakan, ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan menganggap tidak perlu melaporkan hal – hal yang dapat mengganggu informasi tentang sukses keuangan perusahaan. Namun, pada saat tingkat profitabilitas rendah, perusahaan berharap para pengguna laporan akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membaca *good news* kinerja perusahaan, seperti dalam lingkup sosial. Dengan demikian, investor akan tetap berinvestasi di perusahaan tersebut.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Teori *stakeholder* menggambarkan bagaimana perusahaan menjaga hubungan dengan *stakeholder*-nya dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhan para *stakeholder*. Menurut Apriwenni (2012), hubungan yang positif menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba yang tinggi akan memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya agar mendapatkan nilai positif dari *stakeholders*.

### 1. Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal yang disebut juga dengan hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan pengertian teori keagenan sebagai berikut.

*“We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.”*

Teori keagenan membahas hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) dengan manajemen, dimana yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham, dan agen adalah manajemen pengelola perusahaan.

Prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan perusahaan. Agen dikontrak oleh prinsipal, sehingga mempunyai kewajiban terhadap pemenuhan kepentingan prinsipal. Kinerja agen akan di-evaluasi oleh prinsipal melalui laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas agen terhadap prinsipal, sehingga agen dituntut untuk memenuhi harapan dari prinsipal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Masalah keagenan muncul ketika terdapat ketidakseimbangan informasi yang diketahui antara agen dengan prinsipal, di mana agen mempunyai beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal. Hal tersebut terjadi karena agen mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Perbedaan kepentingan inilah yang disebut dengan konflik agensi (*Agency Conflict*) menurut Apriwenni (2012). Sebagai solusinya, pemilik perusahaan memberikan insentif yang layak kepada manajemen dan bersedia mengeluarkan biaya pengawasan (*monitoring cost*).

## 2. Teori Legitimasi

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis untuk mengembangkan perusahaan. Gray et. al dalam Hadi (2011: 88) berpendapat bahwa legitimasi merupakan

*“...a systems-oriented view of organization and society..permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organizations, the state, individuals and group”*

Sedangkan menurut Deegan dalam Hadi (2011: 88) menyatakan legitimasi sebagai

*“...a system-oriented perspective, the entity is assumed to influenced by, and in turn to have influence upon, the society in which it operates. Corporate disclosure are considered to represent on important means by which management can influence external perceptions about organizations.”*

Berdasarkan pengertian tersebut, legitimasi perusahaan menitik beratkan pada *stakeholder perspective* (masyarakat dalam arti luas). Teori legitimasi menyatakan perusahaan akan bertahan, jika masyarakat merasa perusahaan telah beroperasi berdasarkan sistem yang sepadan. Pengungkapan tanggung jawab



sosial merupakan reaksi terhadap tekanan dari lingkungannya, sehingga eksistensi dan aktivitas perusahaan terlegitimasi.

### 3. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 4. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

#### 3. Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* menggambarkan tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai pihak. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*), namun juga pada ranah sosial kemasyarakatan (*stakeholder*). Dengan demikian, tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur pada indikator ekonomi (*economic focused*), kini harus memperhitungkan faktor-faktor sosial (*social dimentions*) terhadap *stakeholder*, baik internal maupun external. Dengan melaksanakan tanggung jawab terhadap *stakeholder*, perusahaan dimudahkan dalam mencapai tujuannya.

Menurut Chairil dan Ghozali (2007) dalam Apriwenni (2012), perusahaan harus menjaga hubungan dengan *stakeholder*, terutama yang mempunyai *power* terhadap ketersediaan sumber daya yang digunakan aktifitas operasional perusahaan, seperti tenaga kerja, pasar atas produk perusahaan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengakomodasi keinginan dan kebutuhannya.

#### 4. Pengungkapan

##### a. Pengertian Pengungkapan

Evans (2003) dalam Suwardjono (2010: 578) mengartikan pengungkapan sebagai berikut.

*“Disclosure means supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

*not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements”*

Lebih spesifik lagi diungkapkan oleh Wolk, Tearney, dan Dodd (2001) dalam Suwardjono (2010: 579) yang menginterpretasikan pengertian pengungkapan sebagai berikut.

*“Broadly interpreted, disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communications including footnotes, post-statements event, management’s discussion and analysis of operation for the footcoming year, financial and operating forecasts, and additional financial statement covering segmental disclosure and extensions beyond historical cost.”*

Evans (2003) membatasi pengertian pengungkapan pada hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak termasuk pengertian pengungkapan. Sementara Wolk, Tearney, dan Dodd (2001) memasukan statemen keuangan segmental dan statemen yang merefleksikan perubahan harga sebagai bagian dari pengungkapan.

#### **b. Tujuan Pengungkapan**

Suwardjono (2010: 580) menyatakan bahwa secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Karena pasar modal merupakan sarana utama pemenuhan dana dari masyarakat, pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, atau melayani kebutuhan khusus.

##### **1) Tujuan Melindungi (*Protective*)**

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai laporan keuangan cukup canggih, sehingga pemakai yang naif

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*).

## 2) Tujuan Informatif (*Informative*)

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

## 3) Tujuan Kebutuhan Khusus (*Differential*)

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan melindungi kepentingan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Sementara itu, untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir – formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

## c. Tingkat Pengungkapan

Hal ini berkaitan dengan masalah seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan yang disebut dengan tingkat pengungkapan (*levels of*

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*disclosure*). Evans (2003) dalam Suwardjono (2010: 581) mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan sebagai berikut.

1) Memadai (*adequate disclosure*)

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi, agar statemen keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan.

2) Wajar atau Etis (*fair or ethical disclosure*)

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai, agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada pihak yang kurang diuntungkan posisinya, atau tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi.

3) Penuh (*full disclosure*)

Tingkat penuh menuntut penyajian penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan yang dituju. Berbagai hal menjadi pertimbangan penyusun standar atau badan pengawas untuk menentukan seberapa banyak informasi yang harus diungkapkan. Kendala pengungkapan pada umumnya timbul dari kaca mata perusahaan.

**d. Metode Pengungkapan**

Metoda pengungkapan berkaitan dengan cara informasi disajikan dalam satu perangkat statemen keuangan beserta informasi lain yang berpaut secara teknis. Metoda ini biasanya ditentukan secara spesifik dalam standar akuntansi atau peraturan lain. Menurut Suwardjono (2010 : 591) informasi dapat disajikan dalam pelaporan keuangan sebagai berikut.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### 1) Pos Statemen Keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statemen keuangan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian (jenis statemen, format statemen, klasifikasi pos, dan susunan pos). Jenis statemen meliputi neraca, statemen laba-rugi, dan statemen perubahan ekuitas, dan statemen aliran kas.

### 2) Catatan Kaki

Catatan kaki (*footnotes*) atau catatan atas statemen keuangan (*notes to financial statements*) merupakan metoda pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan. Catatan atas statemen keuangan menjadi bagian internal dari statemen keuangan secara keseluruhan.

### 3) Penjelasan dalam Kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi. Metoda akuntansi, makna suatu istilah, ketermasukannya suatu unsur, penilaian alternatif, dan acuan (misalnya skedule) merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Pengungkapan dalam bentuk tanda kurung lebih merupakan konvensi daripada sebagai ketentuan standar akuntansi.

### 4) Istilah Teknis

Istilah teknis dan strategik merupakan bagian dari pengungkapan. Oleh karena itu, istilah yang tepat harus digunakan secara konsisten untuk nama pos, elemen, judul (*captions*), atau subjudul. Nama elemen

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



merupakan hal yang sangat strategis karena merupakan objek penting dalam akuntansi. Penyusunan standar banyak menciptakan istilah-istilah teknis untuk merepresentasi suatu realita atau makna dalam akuntansi.

#### 5) Lampiran

Statemen keuangan sebenarnya merupakan salah satu bentuk ringkasan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang dapat dipandang sebagai keputusan strategis. Dengan demikian, statemen keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan (*executive summary*) dalam pelaporan manajemen (internal). Rincian, statemen tambahan (*supplementary statements*), daftar rincian (skedul), atau semacamnya dapat disajikan sebagai lampiran atau disajikan dalam seksi lain yang terpisah dengan statemen utama.

#### 6) Komunikasi Manajemen

Manajemen dapat menyampaikan informasi kualitatif atau nonfinansial yang dirasa penting untuk diketahui pemakai statemen melalui berbagai cara. Wawancara manajer dengan wartawan (jumpa pers atau *pers release*) merupakan salah satu bentuk pengungkapan atau komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pegang saham (*letter to shareholders*), laporan dewan komisaris (*report of board of commissioners*), laporan direksi (*report of board of directors*), dan diskusi dan analisis manajemen / DAM (*management's discussion and analysis / MDA*).

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7) Catatan dalam Laporan Auditor

Pengungkapan yang bermanfaat dapat dilakukan oleh pihak lain, yaitu auditor independen. PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) secara otomatis akan terrefleksi dalam statemen keuangan. Auditor tidak perlu lagi untuk mengungkapkannya dalam laporan auditor karena akan terjadi duplikasi. Statemen keuangan adalah asersi dan representasi manajemen, sehingga pengungkapan adalah kewajiban manajemen bukan auditor. Auditor hanya meyakinkan bahwa pengungkapan sudah cukup berdasarkan standar pelaporan.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## 5. Corporate Social Responsibility

### a. Pengertian Tanggung Jawab Sosial

Definisi CSR menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) sebagai berikut.

*“Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large.”*

Hal di atas sejalan dengan pendapat dari Johnson dan Johnson dalam Hadi (2011: 46)

*“CSR is about how companies manage the bussines processes to produce an overall positive impact to society.”*

Berdasarkan pengertian diatas, tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikatakan sebagai konsep bagi para manajer perusahaan untuk tidak hanya memperhatikan kegiatan perusahaan dalam mencari keuntungan, namun juga memperhatikan keadaan lingkungan dan sosialnya. Karena itu, manajer harus mampu mengelola bisnis operasinya dengan baik serta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan, kehidupan karyawan, serta masyarakat di sekitarnya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**b. Alasan Pengungkapan Sosial**

Harahap (2011: 398) mengemukakan beberapa paradigma yang menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya.

1) Kecenderungan terhadap kesejahteraan sosial

Sejarah menunjukkan bahwa kelangsungan hidup manusia, dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat lahir dari sikap kerja sama antar unit-unit masyarakat. Negara tidak bisa hidup sendiri tanpa partisipasi rakyatnya, perusahaan juga tidak akan maju tanpa dukungan langganannya dan lingkungan sosialnya. Kenyataan ini semakin disadari dan semakin dibutuhkan pertanggungjawabannya.

2) Kecenderungan terhadap kesadaran lingkungan

Terdapat paradigma yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk di antara bermacam-macam makhluk yang mendiami bumi yang saling mempunyai keterkaitan dan sebab-akibat serta dibatasi oleh sifat keterbatasan dunia itu sendiri, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Peningkatan kesadaran perusahaan terhadap kenyataan tersebut menimbulkan kebutuhan tentang perlunya melakukan pertanggungjawaban sosial kepada *stakeholder*.

3) Perspektif ekosistem

Orientasi yang terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, efisiensi, dan *profit maximum* menimbulkan krisis ekosistem. Tanpa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembatasan terhadap tingkah laku manusia tampaknya yang timbul hanya kehancuran dan kekacauan termasuk banjir dan polusi udara.

4) Ekonomi vs sosialisasi

Ekonomi mengarahkan perhatian hanya kepada kepuasan individual sebagai unit yang selalu mempertimbangkan *cost* dan *benefit*, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, sosialis memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan sosial dan selalu memperhatikan efek sosial yang ditimbulkan oleh kegiatannya.

**c. Bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Bradshaw dalam Harahap (2011: 406-407) mengemukakan 3 bentuk tanggung jawab sosial perusahaan:

1) Sumbangan Perusahaan (*corporate philanthropy*)

Tanggung jawab perusahaan terbatas pada kedermawanan dan kerelaan, belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab tersebut bisa merupakan kegiatan amal, sumbangan atau kegiatan lain yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

2) Tanggung Jawab Perusahaan (*corporate responsibility*)

Kegiatan pertanggungjawaban sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan, bisa karena ketentuan Undang-Undang atau bagian dari kesediaan dan kemauan perusahaan.

3) Kebijakan Perusahaan (*corporate policy*)

Tanggung jawab sosial perusahaan sudah merupakan bagian dari kebijakannya.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pendapat Bradshaw dalam Harahap (2011: 406 - 407) pada bagian pertama mengenai sumbangan perusahaan dapat juga dikategorikan sebagai apa yang disebut *charity*. Hal ini didasarkan pada argumentasi daripada tanggung jawab perseroan sebagai bagian daripada investasi yang memberikan manfaat jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat / lingkungan sekitar.

**6. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

**6. Global Reporting Initiative**

*Global Reporting Initiative* (GRI) yang digunakan dalam penelitian ini adalah GRI G4 *Guidelines* 2013. Diharapkan GRI berfungsi sebagai dasar pengukuran tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan laporan tahunan perusahaan. GRI biasanya digunakan perusahaan sebagai pedoman atau panduan untuk memberikan pelaporan kinerja yang berkelanjutan. Laporan tahunan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai media untuk mengkomunikasikan tindakan tanggung jawab perusahaan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. GRI G4 *Guidelines* 2013 terdiri dari 91 indikator dan terbagi ke dalam enam kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan dan perkerjaan yang layak, hak asasi manusia, kemasyarakatan, dan pertanggungjawaban produk. Indikator tersebut dinyatakan dalam tabel berikut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.1**

**Kerangka Kerja GRI G4 Guidelines 2013**

Kategori	Aspek	Jumlah Indikator
<b>Kinerja Ekonomi</b>		
Ekonomi	Kinerja Ekonomi, Kehadiran Pasar, Dampak Ekonomi Tidak Langsung, Praktek Pengadaan	9
<b>Kinerja Lingkungan</b>		
Lingkungan	Bahan, Energi, Air, Keanekaragaman Hayati, Emisi, Efluen dan Limbah, Produk dan Jasa, Kepatuhan, Transportasi, Lain – Lain, Asesmen Pemasok atas Lingkungan, Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan	34
<b>Kinerja Sosial</b>		
Tenaga Kerja dan Pekerjaan yang Layak	Kepegawaian, Hubungan Industrial, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pelatihan dan Pendidikan, Keberagaman dan Kesetaraan Peluang, Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki – Laki, Asesmen Pemasok atas Praktik Ketenagakerjaan, Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan	16
Hak Asasi Manusia	Investasi, Non-diskriminasi, Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Pekerja Anak, Pekerja Paksa atau Wajib Kerja, Praktik Pengamanan, Hak Adat, Asesmen, Asesmen pemasok atas Hak Asasi Manusia, Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	12
Kemasyarakatan	Masyarakat Lokal, Anti-korupsi, Kebijakan Publik, Anti-persaingan, Kepatuhan, Asesmen Pemasok atas Dampak terhadap Masyarakat, Mekanisme Pengaduan, Dampak terhadap Masyarakat	11
Pertanggungjawaban Produk	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan, Pelabelan Produk dan Jasa, Komunikasi Pemasaran, Privasi Pelanggan, Kepatuhan	9
<b>Jumlah</b>		<b>91</b>

Sumber : *Global Reporting Initiative G4 Guidelines 2013*

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## 7. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Menurut Sembiring (2005), ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variabel pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Apriwenni (2012) menyatakan bahwa berdasarkan teori agensi, semakin besar suatu perusahaan, maka biaya keagenan yang muncul juga semakin besar. Perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih luas untuk mengurangi biaya keagenan tersebut.

Menurut Cowen et. al., (1987) dalam Sembiring (2005), perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan. Perusahaan besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memerhatikan program sosial perusahaan, sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Dari sisi tenaga kerja, semakin banyak tenaga kerja dalam suatu perusahaan menyebabkan tekanan pada pihak manajemen untuk memperhatikan kepentingan tenaga kerja semakin besar. Hal ini menyebabkan program tanggung jawab sosial perusahaan semakin banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan. Pemahaman tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sembiring (2005), dan Apriwenni (2012) yang menunjukkan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

## Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## 8. Leverage

Leverage merupakan rasio untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang atau proporsi total utang terhadap rata-rata ekuitas pemegang saham. Rasio leverage digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga resiko tak tertagih



suatu hutang dapat dilihat. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage rendah, lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Belkaoui & Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage, maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit, sehingga perusahaan akan berusaha untuk melaporkan laba sekarang lebih tinggi. Agar laba yang dilaporkan tinggi, maka manajer harus mengurangi biaya-biaya, termasuk biaya untuk mengungkapkan informasi sosial.

Salah satu argumen dalam hubungan antara *leverage* dan pengungkapan tanggung jawab sosial adalah bahwa berdasarkan teori keagenan, perusahaan yang memiliki rasio leverage yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Menurut Darwis (2009), tambahan informasi tersebut diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak – hak mereka sebagai kreditur. Oleh karena itu, perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio leverage yang rendah.

## 9. Kepemilikan Manajemen

Komalasari dan Yane (2012) mengartikan kepemilikan saham manajerial sebagai kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen baik direksi, komisaris, maupun karyawan dengan persyaratan tertentu untuk

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki saham tersebut. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen diharapkan manajemen dapat mengesampingkan keinginan pribadi yang membawa dampak kurang baik bagi perusahaan.

Kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi *agency problem* diantara manajer dan pemegang saham yang dapat dicapai melalui penyalarsan kepentingan diantara pihak – pihak yang berbenturan kepentingannya (LKDI, 2010 dalam Komalasari dan Yane, 2012). Kepemilikan saham tersebut dapat diperoleh jika perusahaan menerapkan program kepemilikan saham yang dikenal dengan nama Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan / Manajemen.

Jensen dan William (1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan perusahaan. Di sisi lain, semakin besar kepemilikan manajer di dalam perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Gray, et al. (1988) dalam Anggraini (2006) menyatakan bahwa manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitas tersebut.

## 10. Profitabilitas

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pengertian rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, baik dalam bentuk laba perusahaan, maupun nilai ekonomis atas penjualan, asset bersih perusahaan maupun modal sendiri (*shareholder equity*).

Penelitian terhadap pengaruh profitabilitas dan pengungkapan tanggung jawab sosial sangat beragam. Hubungan yang positif menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba yang tinggi akan memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, agar mendapatkan legitimasi dan nilai positif dari *stakeholders* (Apriwenni, 2012).

Di sisi lain, Donovan dan Gibson (2000) dalam Sembiring (2005) menyatakan ketika perusahaan memiliki tingkat laba yang tinggi, perusahaan (manajemen) tidak perlu melakukan pengungkapan informasi, namun pada tingkat profitabilitas yang rendah, perusahaan akan melakukan pengungkapan informasi, dengan harapan para pengguna laporan akan membaca “*good news*” kinerja perusahaan.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## B. Penelitian Terdahulu

Telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan CSR dan praktik CSR di Indonesia. Berikut akan disajikan penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Sembiring (2005) mencoba menemukan bukti mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *size*, *profile*, dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan profitabilitas, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

**Tabel 2.2**

**Ikhtisar Penelitian Eddy Rismanda Sembiring**

© Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Judul Penelitian	Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta
Tahun Penelitian	2005
Objek Penelitian	Perusahaan-perusahaan <i>go public</i> yang terdaftar di bursa efek Jakarta
Data yang Diteliti	Laporan tahunan 2001
Lingkungan Negara	Indonesia
Variabel Dependen	Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
Variabel Independen	<i>Size</i> , profitabilitas, <i>profile</i> , ukuran dewan komisaris, dan <i>leverage</i>
Kesimpulan	1. <i>Size</i> perusahaan, <i>profile</i> , dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. Profitabilitas, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Anggraini (2006) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam annual report perusahaan.

Hasil yang diperoleh adalah variabel kepemilikan manajemen dan tipe industri mempengaruhi pengungkapan informasi sosial perusahaan secara signifikan.

Variabel independen lain seperti *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan informasi sosial.



Tabel 2.3

**Ikhtisar Penelitian Fr. Reni. Retno Angraini**

Judul Penelitian	Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan – Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)
Tahun Penelitian	2006
Objek Penelitian	Perusahaan <i>go public</i> di bursa efek Jakarta
Data yang Diteliti	Laporan keuangan lengkap 2000-2004
Lingkungan Negara	Indonesia
Variabel Dependen	Kebijakan pengungkapan informasi sosial perusahaan
Variabel Independen	Presentase kepemilikan manajemen, tingkat <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, tipe industri, dan profitabilitas
Kesimpulan	1. Kepemilikan manajemen dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial perusahaan. 2. Ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan informasi sosial perusahaan.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Sari (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sari (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh positif, dan *profile* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun, *leverage*, dan *growth* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.



Tabel 2.4

**Ikhtisar Penelitian Rizkia Anggita Sari**

Judul Penelitian	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Data yang Diteliti	2008-2010
Lingkungan Negara	Indonesia
Variabel Dependen	Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
Variabel Independen	<i>Size</i> , profitabilitas, <i>profile</i> , <i>leverage</i> , dan <i>growth</i>
Kesimpulan	1. Ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 2. <i>Leverage</i> , dan <i>growth</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. 3. <i>Profile</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Priantinah (2012) melakukan penelitian terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 – 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dewan komisaris, serta *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan kepemilikan saham publik, dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Tabel 2.5**

**Ikhtisar Penelitian Denies Priantinah**

Judul Penelitian	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan berkategori high profile yang terdaftar di BEI
Data yang Diteliti	2008-2010
Lingkungan Negara	Indonesia
Variabel Dependen	Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>
Variabel Independen	Profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, <i>leverage</i> , dan pengungkapan media
Kesimpulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan CSR.</li> <li>2. Kepemilikan saham publik, dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</li> <li>3. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR.</li> <li>4. Dewan komisaris berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pengungkapan CSR.</li> <li>5. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR.</li> </ol>

Apriwenni (2012) melakukan penelitian terhadap yang terdaftar di BEI periode 2007 – 2009. Apriwenni (2012) menggunakan 3 variabel yaitu mekanisme *corporate governance*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan mekanisme *Corporate Governance* dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.6

**Ikhtisar Penelitian Prima Apriwenni**

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Judul Penelitian	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Luas Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2007-2009
Tahun Penelitian	2012
Objek Penelitian	Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Data yang Diteliti	2007-2009
Lingkungan Negara	Indonesia
Variabel Dependen	Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
Variabel Independen	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , ukuran perusahaan, dan profitabilitas
Kesimpulan	1. Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**C. Kerangka Pemikiran**

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 

Perusahaan yang lebih besar dianggap memiliki aktifitas operasi yang lebih berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan perusahaan menjadi entitas yang banyak disorot oleh masyarakat, sehingga perusahaan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas untuk mengurangnya. Selain itu, bagi perusahaan yang menjadi sorotan banyak pihak (*political visivility*), angka akuntansi yang dilaporkan dapat memiliki konsekuensi ekonomi, seperti besarnya pajak yang harus dibayar.



Perusahaan akan semakin banyak mengeluarkan pembiayaan untuk aktifitas sosial, sehingga perusahaan dapat mengurangi *political visibility*-nya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sari (2012), dan Apriwenni (2012) yang berhasil menemukan pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, dapat diduga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

### Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

*Leverage* mencerminkan tingkat risiko keuangan perusahaan. Perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang rendah akan lebih banyak melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya lebih rendah, hal ini dikarenakan perusahaan harus mengurangi biaya-biaya untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar dapat memaksimalkan laba sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *leverage* diduga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Priantinah (2012).

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan, dengan kata lain biaya pengawasan menjadi rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam rangka untuk meningkatkan *image* perusahaan, meskipun ia harus mengorbankan sumber daya untuk aktifitas tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab social perusahaan.

#### 4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

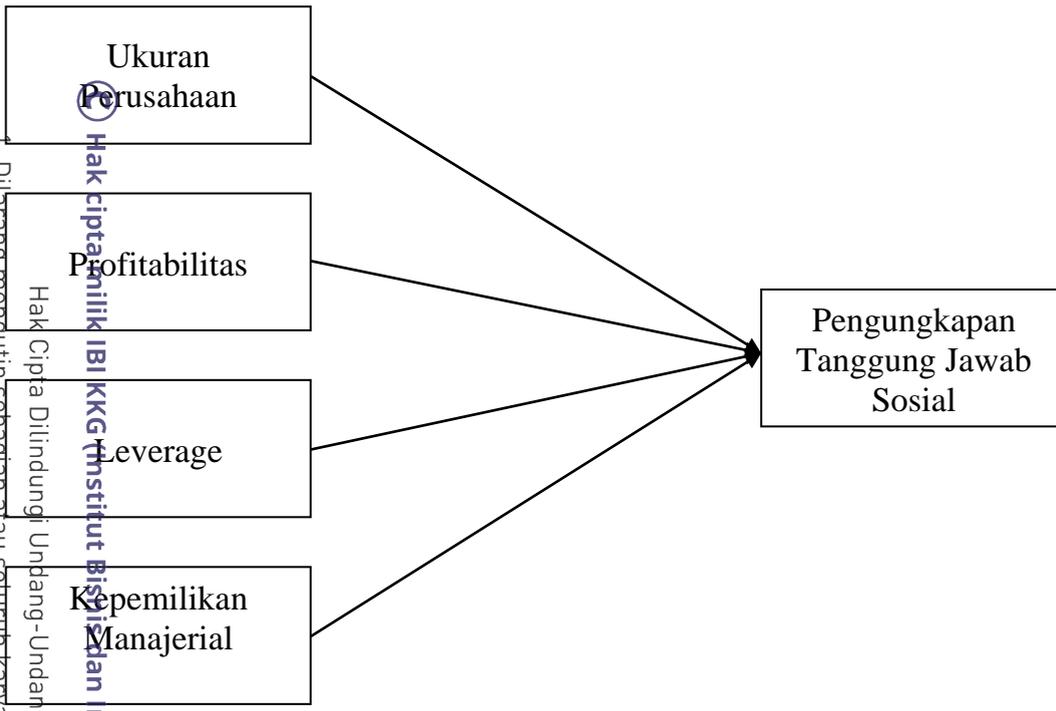
Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996). Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan keluwesan kepada manajemen untuk melaksanakan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial. Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah akan sangat mempertimbangkan pelaksanaan tanggung jawab sosial, karena khawatir akan mengganggu operasional perusahaan. Semakin besar profitabilitas, semakin besar pula keefektifan perusahaan dalam pengelolaan, sehingga perusahaan akan lebih banyak melakukan pengungkapan termasuk pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal senada juga disampaikan Bowman dan Haire (1976) dan Preston (1978) dalam Hackston dan Milne (1996: 82) yang mendukung hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial perusahaan.

### C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang telah dijabarkan dan kerangka pemikiran diatas, peneliti mencoba mengambil hipotesis sebagai berikut.

Ha<sub>1</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur.

Ha<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur.

Ha<sub>3</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur.

Ha<sub>4</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur,